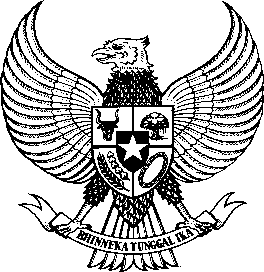
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL UMEANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

PERBEKEL DESA UMEANYAR

Menimbang : a. bahwa anak adalah kelompok rentan yang cendrung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara wajib mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk mengetahui dan melindungi anak secara dini dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan dan diskriminasi yang terjadi pada anak perlu membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Umeanyar tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undnag nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentag Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Terhadap Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

###### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Masyarakat di Desa Umeanyar Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program kerja;
2. Mengkoordinasikan kegiatan dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
3. Melaksanakan rapat-rapat membahas kegiatan tentang perlindungan anak;
4. Memberikan informasi, sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang norma sosial dan praktek budaya yang meneria, membenarkan atau mengabaikan keberaadaan;
5. Membangun system pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
6. Melakukan mediasi, mendampingi korban dan melayani hak-hak korban kekerasan terhadap anak dengan melakukan langkah :
   1. Mengidentifikasi, menolong dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak;
   2. Membawa anak korban kekerasan ke pusat rujukan atau unit layanan atau P2TP2A di wilayahnya;
   3. Melakukan jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku dan anak dalam resiko;
7. Membuat pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Umenyar

**** pada tanggal 29 Januari 2019

**Perbekel Desa Umeanyar**

**PUTU EDY MULYANA**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian PP-PA Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas BP3A Provinsi Bali;
3. Bupati Buleleng;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas PPKB-PPPA Kabupaten Buleleng;
7. Camat Seririt
8. Anggota Tim
9. A r s i p

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DESA UMEANYAR

NOMOR : 12 TAHUN 2019

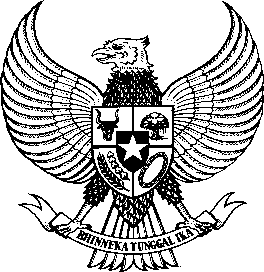
TANGGAL : 29 Januari 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | UNSUR | KETERANGAN |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | Putu Edy Mulyana  Made Dedy Putrawan  Putu Purna Jaya  Ni Wayan Sutianingsih  Made Wisiani  Kadek Agus Ariana  I Ketut Nila  I Made Astika  Ketut Pasek Widiasa  Kadek Suartama | Perbekel  Ketua BPD  Ketua LPM  Bidan Desa  Ketua TP. PKK  PLKB Desa  Babinkamtibmas  Hansip  Anak/Forum Anak  Anak/Forum Anak |  |

KEPALA DESA UMEANYAR

**PUTU EDY MULYANA**

BUPATI BULELENG

NOMOR / / HK / 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN SERIRIT DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai generasi penerus cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksitensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara fisik, mental maupun sosial;

b. bahwa untuk membangunan Kabupaten Layak Anak diperlukan pembangunan satu wilayah admnistrasi yang mengintegrasikan kondisi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;

c. bahwa untuk menunjang Kabupaten Buleleng menuju Kabupaten Layak anak dipandang perlu untuk menunjuk Kecamatan Seririt dan Desa/Kelurahan se- Kecamatan Seririt sebagai Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dalam rangka Kabupaten Buleleng menuju Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Seririt dan Desa/Kelurahan Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kabijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak 9Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor ... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor .............);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79).

###### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kecamatan Seririt dan Desa/Kelurahan se- Kecamatan Seririt sebagai kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 I Keputusan ini;

KEDUA : Membentuk Susunan Gugus Tugas dan uraian Tugas Kecamatan Seririt dan Desa/Kelurahan se- Kecamatan Seririt menuju Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam lapiran I, II, III dan IV Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menuju Layak Anak sebagaimana dimaksud :

1. Menyusun data dasar tentang situasi anak di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik bagi anak;
2. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
3. Melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
4. Menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
5. Mengembangkan kearifan lokal yang mendukung terwujudnya kegiatan menuju Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
6. Menyusun rencana aksi menuju Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
7. Memfasilitasi seluruh kegiatan rencana aksi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
8. Memfasilitasi seluruh kegiatan dalam pemantauan evaluasi dan pelaporan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan baik secara periodik maupun insidentil serta penyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana aksi Pembangunan Kabupaten Layak Anak;
9. Bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal

**BUPATI BULELENG**

**PUTU AGUS SURADNYANA**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
7. Yang bersangkutan
8. A r s i p

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN DAN PEBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN SERIRIT DAN DESA/KELURAHAN SE- KECAMATAN SERIRIT SEBAGAI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KETERANGAN |
| 1. | SERIRIT | Kalianget  Joanyar  Tangguwisia  Sulanyah  Bubunan  Ringdikit  Rangdu  Mayong  Bestala  Munduk Bestala  Gunungsari  Seririt  Pengastulan  Patemon  Lokapaksa  Ularan  Unggahan  Umeanyar  Banjarasem  Kalisada  Pangkung paruk |  |

BUPATI BULELENG

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN DAN PEBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN SERIRIT DAN DESA/KELURAHAN SE- KECAMATAN SERIRIT SEBAGAI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

SUSUNAN GUGUS TUGAS KECAMATAN SERIRIT MENUJU LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penasehat |  | 1. Bupati Buleleng 2. Wakil Bupati Buleleng |
| Pembina |  | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng 2. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah |
| Ketua |  | I Nyoman Riang Pustaka, S.IP (Camat Seririt) |
| Sekretaris  Wakil Sekretaris |  | I Made Mardika, SE (Sekretaris Kecamatan Seririt  Setyo Herlambang (Kasi Pembangunan Kecamatan Seririt) |
| Bendahara |  | Ni Made Yeni Irawati (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Seririt |
| Kluster I  Hak Sipil dan Kebebasan |  | 1. I Gede Yasa, S.Ag (Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Seririt 2. Made Udayana (Kasi Pemerintahan Kecamatan Seririt 3. I Putu Nesa, SH ( Ketua Majelis Alit Desa Pakraman Kec. Seririt) |
| Kluster II  Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif |  | 1. I Putu Mangku (Koord. PLKB Kecamatan Seririt) 2. Ghozali, SH (Kepala Urusan Agama Kecamatan Seririt) 3. Luh Sri Adnyani (Ketua Pokja I TP. PKK Kec. Seririt) 4. Ni Komang Remben, S.Pd (Ketua WHDI Kec. Seririt) |
| Kluster III  Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan |  | 1. Dr. Gde Juena (Kepala Puskesma I Seririt) 2. Desak Gede Wistari Ekayani ( Anggota Pokja IV TP. PKK Kecamatan Seririt |
| Kluster IV  Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya |  | 1. I Gusti Kompyang Partha (Kasi Sosial dan Budaya Kec. Seririt) 2. I Putu Ardika, S.Pd (Kepala UPP Kec. Seririt) 3. Komang Tirta Sumandhi (Ketua Pokja III Kec. Seririt) 4. A.A. Widya Putra (Unsur Dunia Usaha) |
| Kluster V  Perlindungan Khusus |  | 1. Made Sujana, SH (Kasi Linmas dan Satpol PP Kecamatan Seririt) |